

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Di era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin kuat, adanya persaingan yang semakin kompetitif tersebut perusahaan dituntut untuk lebih memperkuat fundamental manajemen agar mampu bersaing dengan perusahaan tertentu yang akan menghindari kondisi-kondisi yang mengakibatkan kebangkrutan

Persaingan bisnis yang ketat membuat perusahaan harus memiliki strategi khusus agar dapat unggul dari para pesaingnya. Sayangnya, dalam melaksanakan strategi tersebut, ada banyak kendala yang dihadapi perusahaan, salah satunya soal pendanaan. Namun pasar modal memberikan solusinya, yaitu dengan mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*go public*)

*Go public* atau penawaran umum saham adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, perusahaan *go public* sering disebut sebagai perusahaan IPO (*initial public offering*), yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang

maupun modal sendiri (Darmadji, 2001:2). Melalui pasar modal, investor dapat melakukan investasi di beberapa perusahaan melalui pembelian surat-surat berharga yang di perdagangkan di pasar modal, sedangkan perusahaan pihak yang memerlukan dana akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Perusahaan yang terdaftar di BEI terdiri dari beberapa sektor, dimana salah satu sektor yang diminati investor adalah sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi untuk menambah nilai atas barang tersebut. Para investor kini mulai melirik perusahaan manufaktur di Indonesia karena laju pertumbuhan pada sektor ini melaju cukup cepat .

Pertumbuhan perusahaan industri manufaktur memegang posisi yang dominan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat sehari-hari (Adnyana dan Badjra, 2014). Perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI juga memegang jumlah terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebanyak 167 perusahaan pada tahun 2013.

Setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Keuntungan yang telah dicapai perusahaan akan disajikan dalam sebuah laporan keuangan yang akan di publikasikan kepada masyarakat luas. Melalui keuntungan yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya (Sulistiyowati dkk, 2010).

Fenomena kebijakan dividen terjadi yaitu pada kasus yang terdapat pada beberapa perusahaan yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba pada periode tersebut menurun. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan untuk tidak membagikan keuntungan (dividen) kepada pemegang saham untuk tahun buku 2016 karena keuangan perusahaan memburuk pada periode tersebut (cnnindonesia.com). Pada kasus lain yang terjadi di Anak Usaha PT Lippo Karawaci Tbk, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, perusahaan ini tetap melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun pendapatan dan laba perusahaan pada periode tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya (tempo.co). Menurut Weston dan Copeland (2010) kebijakan dividen adalah suatu kebijakan untuk menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi kembali perusahaan.

Kebijakan dividen pada perusahaan yang go public mempunyai dampak yang sangat penting bagi para investor maupun bagi perusahaan. Pada umumnya para investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu mengharapkan keuntungan atas investasinya dalam bentuk dividen.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen masih menjadi perdebatan (Al Shabibi dan Ramesh, 2011). Banyak teori yang dikemukakan para ahli dalam menjelaskan sebuah perusahaan untuk membagikan dividen. Teori-teori tersebut antara lain Teori Agensi, Teori Signalling, Teori Pecking Order, Teori Biaya Transaksi, dan Teori Bankruptcy.

Salah satu teori yang paling penting dalam menjelaskan kebijakan dividen adalah Teori Agensi (Al Shabibi dan Ramesh, 2011). Teori ini menekankan pentingnya mekanisme yang mampu menyetarakan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Penerapan GCG adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan itu. Penerapan GCG diyakini mampu mengurangi biaya agensi sehingga meningkatkan pengembalian terhadap investasi pemegang saham dalam bentuk dividen serta konsisten dan komitmen melaksanakan kewajibannya kepada semua pihak di lingkungannya, dan perusahaan juga dapat tumbuh secara berkelanjutan (Sari,2017)

*Good Corporate Governance* merupakan faktor keuangan lainnya yang saat ini banyak dipertimbangkan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* juga telah menjadi masalah yang serius dalam dekade terakhir. Pasalnya *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan dan dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat berkompetisi di era global. Perusahaan dapat menerapkan atau memperbaiki *good corporate governance* agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di dunia.

Dalam penelitian ini akan menguji Pengaruh Kepemilikan Institusional, komisaris Independen , komite audit, dan likuiditas terhadap kebijakan dividen . Alasan memilih Variabel Kepemilikan institusional , komisaris independen , komite audit dan likuiditas sebagai variabel

independen karena berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, bahkan di Indonesia membuat topik tentang pengaruh GCG terhadap kebijakan dividen menarik untuk diteliti kembali. Selain itu, penelitian tentang pengaruh penerapan mekanisme GCG terhadap kebijakan dividen belum banyak dilakukan di Indonesia.

Pemilihan kepemilikan institusional dalam penelitian ini karena kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Hasil dari jurnal (Cholifah & Priyadi, 2014), menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi variable kebijakan dividen sebaliknya Dalam jurnalnya (Sugiarto, 2015), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen sejalan dengan (Dewi, 2008).

Sementara itu, perlu disadari bahwa kebijakan dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang tentunya sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Abor dan Fiador (2013) yang memproksikan GCG menjadi jumlah komisaris, CEO independen, persentase komisaris independen, dan kepemilikan institusional. GCG dalam penelitian ini bukanlah tata kelola perusahaan secara umum melainkan hanya sebagian dari mekanisme GCG, yaitu jumlah anggota

dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel kontrol untuk menambah signifikansi pengaruh GCG terhadap kebijakan dividen.

Al Shabibi dan Ramesh, (2011) menemukan bahwa komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan risiko perusahaan yang berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perwira Hendrik dan Dewi Ratna Ningsih (2017) menemukan bahwa komisaris independen dan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen

Unsur-unsur dominan selanjutnya dalam keberlangsungan penerapan GCG adalah adanya komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Menurut peraturan menteri negara BUMN nomor: Per-01/MBU tahun 2011 komite audit adalah organ pendukung dewan komisaris untuk melakukan pengawasan. Ukuran komite audit berperan penting dalam indikator kebijakan dividen. Komite audit bertugas untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Hasil dari jurnal (Padil & Wardatul Adawiyah, 2019) menyatakan bahwa komite berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sebaliknya dalam jurnalnya (Sari, 2017) mengatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah Likuiditas. Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Hal ini berarti bahwa makin kuat posisi likuiditasnya

suatu perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana diwaktu-waktu mendatang, akan makin tinggi rasio pembayaran dividennya Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan deviden ginting (2018), ayu dkk (2015), kristianawati (2016). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh sapitri (2017), arilaha (2009) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Perusahaan yang mungkin memiliki posisi likuiditasnya buruk mampu memperoleh laba bersih setelah pajak dan memiliki laba ditahan besar. Hal itu disebabkan karena laba tersebut telah diinvestasikan ke harta tetap. Dalam keadaan yang demikian, perusahaan memutuskan tidak membagi dividen. Dividen tidak boleh dibayarkan jika perusahaan dalam posisi tidak likuid, artinya hutang lancar lebih besar daripada harta lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas lebih baik maka akan mampu membayar dividen lebih banyak. Pada perusahaan yang membukukan keuntungan lebih tinggi (profitabilitas tinggi), ditambah likuiditas yang lebih baik, maka semakin besar jumlah dividen yang dibagikan. Dividen akan semakin besar dibayarkan apabila tingkat likuiditas perusahaan semakin tinggi karena dividen merupakan arus kas keluar.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Ginting (2015) dengan judul penelitian pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) , dengan penambahan satu Variabel yaitu Likuiditas dan **proksi dari GCC** yaitu Komite Audit . Likuiditas merupakan faktor yang penting yang harus

dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dan Komite Audit ideal bagi perusahaan terbuka terkait peluangnya membayarkan dividen atau tidak, sehingga mereka dapat lebih baik dalam memahami perusahaan tersebut sesuai kebutuhan yang diinginkannya.

Atas dasar penjelasan dan pentingnya penilaian tentang kebijakan dividend dan faktor apa saja yang mempengaruhinya maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian tentang :

**“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen ,Komite Audit dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Periode 2016-2020”.**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kebijakan dividen ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan dividen
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kebijakan dividen
4. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen

## **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi siapapun yang membacanya, khususnya mahasiswa akuntansi mengenai kebijakan dividen. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat

menjadi rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian serupa.

## **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh investor.